



PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

Nomor : 48 Tahun 2025

Tanggal : 31 Desember 2025

tentang

**Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2026**



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Mataram No.1 Pekalongan Telp. (0285) 421091 Kode Pos 51128
Laman: <https://pekalongankota.go.id/> E-mail: pekalongankota.go.id

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.

13. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
18. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
19. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Tahun Anggaran 2026 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp853.192.111.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus sebelas ribu rupiah), bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp293.309.204.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus empat ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.550.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.060.270.000,00 (seratus empat puluh empat miliar enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.226.934.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.472.000.000,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.550.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - f. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - g. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.250.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp59.600.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah).

- (7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah).
- (8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan Rp144.060.270.000,00 (seratus empat puluh empat miliar enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.378.395.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.829.875.000,00 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.226.934.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), berupa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.226.934.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.472.000.000,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah), terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;

- f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. pendapatan BLUD;
 - h. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir; dan
 - i. pendapatan atas sanksi administrasi pajak Daerah.
- (2) Hasil penjualan bmd yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp303.896.000,00 (tiga ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - (3) hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
 - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp997.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
 - (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).
 - (6) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (7) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.136.104.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus empat ribu rupiah).
 - (9) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (10) Pendapatan atas sanksi administrasi pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp544.932.907.000,00 (lima ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp518.926.529.000,00 (lima ratus delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.006.378.000,00 (dua puluh enam miliar enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp518.926.529.000,00 (lima ratus delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.116.906.000,00 (enam belas miliar seratus enam belas juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp397.733.640.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.075.983.000,00 (seratus lima miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.006.378.000,00 (dua puluh enam miliar enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) berupa pendapatan bagi hasil.

Pasal 12

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp853.192.111.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus sebelas ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp828.442.295.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp383.274.722.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp421.790.250.000,00 (empat ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.883.273.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp494.050.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp383.274.722.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp236.746.993.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.930.118.000,00 (seratus delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.515.575.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.104.500.000,00 (satu miliar seratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp881.136.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.096.400.000,00 (satu miliar sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp421.790.250.000,00 (empat ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.506.571.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp202.219.733.000,00 (dua ratus dua miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.413.309.000,00 (enam miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.001.500.000,00 (dua puluh dua miliar satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.258.050.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.530.900.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 121.860.187.000,00 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 22.883.273.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.835.173.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.448.100.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan Rp494.050.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.650.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp18.749.816.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;

- c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.762.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.504.601.000,00 (empat miliar lima ratus empat juta enam ratus satu ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.525.424.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.717.619.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 20

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp14.950.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 21

Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp19.335.000.000, (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) berupa sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 22

Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp4.385.000.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) berupa Pembentukan Dana Cadangan.

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp14.950.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp14.950.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 24

Uraian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. Lampiran I: Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II: Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV: Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN,



MUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 48



KOTA PEKALONGAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	293.309.204.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	136.550.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.700.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.395.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.395.000.000,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	300.000.000,00
4.1.01.09.002.00001	Pajak Reklame Kain	300.000.000,00
4.1.01.09.004	Pajak Reklame Selebaran	5.000.000,00
4.1.01.09.004.00001	Pajak Reklame Selebaran	5.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	2.500.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	16.250.000.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	16.250.000.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	16.250.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19.500.000.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	19.500.000.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	19.500.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	59.600.000.000,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	19.500.000.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	18.850.000.000,00
4.1.01.19.001.00002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	650.000.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	29.700.000.000,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	29.700.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	6.500.000.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	6.500.000.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	1.000.000.000,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.000.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2.900.000.000,00
4.1.01.19.005.00001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	2.075.000.000,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	50.000.000,00
4.1.01.19.005.00008	PBJT-Permainan Ketangkasan	700.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.005.00011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	5.000.000,00
4.1.01.19.005.00012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	70.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	23.000.000.000,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	23.000.000.000,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	23.000.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	12.000.000.000,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	12.000.000.000,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	12.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	144.060.270.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	131.378.395.000,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	123.921.546.000,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	21.369.971.000,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	102.194.500.000,00
4.1.02.01.001.00006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	357.075.000,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	180.000.000,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	180.000.000,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.600.000.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.600.000.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	5.647.349.000,00
4.1.02.01.005.00001	Retribusi Pelataran	453.100.000,00
4.1.02.01.005.00002	Retribusi Los	2.205.198.000,00
4.1.02.01.005.00003	Retribusi Kios	2.989.051.000,00
4.1.02.01.009	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	29.500.000,00
4.1.02.01.009.00001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	29.500.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	11.829.875.000,00
4.1.02.02.003	Retribusi Tempat Pelelangan	3.000.000.000,00
4.1.02.02.003.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	3.000.000.000,00
4.1.02.02.006	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	54.000.000,00
4.1.02.02.006.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	54.000.000,00
4.1.02.02.007	Retribusi Rumah Potong Hewan	120.500.000,00
4.1.02.02.007.00001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	120.500.000,00
4.1.02.02.012	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.337.100.000,00
4.1.02.02.012.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.337.100.000,00
4.1.02.02.014	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	482.875.000,00
4.1.02.02.014.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	482.875.000,00
4.1.02.02.017	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.769.128.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.017.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.769.128.000,00
4.1.02.02.019	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	339.072.000,00
4.1.02.02.019.00001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	339.072.000,00
4.1.02.02.020	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.727.200.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	4.727.200.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	852.000.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	800.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	800.000.000,00
4.1.02.03.008	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	52.000.000,00
4.1.02.03.008.00001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	52.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.226.934.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.226.934.000,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.621.934.000,00
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.621.934.000,00
4.1.03.02.003	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	605.000.000,00
4.1.03.02.003.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	605.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.472.000.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	303.896.000,00
4.1.04.01.002	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	253.896.000,00
4.1.04.01.002.00054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	73.896.000,00
4.1.04.01.002.00056	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	100.000.000,00
4.1.04.01.002.00142	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	75.000.000,00
4.1.04.01.002.00510	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	5.000.000,00
4.1.04.01.003	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00
4.1.04.01.003.00005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.480.000.000,00
4.1.04.03.001	Hasil Sewa BMD	1.360.000.000,00
4.1.04.03.001.00001	Hasil Sewa BMD	1.360.000.000,00
4.1.04.03.003	Hasil dari Bangun Guna Serah	120.000.000,00
4.1.04.03.003.00001	Hasil dari Bangun Guna Serah	120.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	997.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00
4.1.04.05.003	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	385.000.000,00
4.1.04.05.003.00001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	385.000.000,00
4.1.04.05.006	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	2.000.000,00
4.1.04.05.006.00001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	2.000.000,00
4.1.04.05.007	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	10.000.000,00
4.1.04.05.007.00001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	10.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.170.000.000,00
4.1.04.07.001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.170.000.000,00
4.1.04.07.001.00001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.170.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000,00
4.1.04.08.001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.000.000,00
4.1.04.08.001.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000,00
4.1.04.11.001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000,00
4.1.04.11.001.00001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.136.104.000,00
4.1.04.16.002	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.136.104.000,00
4.1.04.16.002.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1.136.104.000,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.000.000,00
4.1.04.19.001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.000.000,00
4.1.04.19.001.00001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.000.000,00
4.1.04.27	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	365.000.000,00
4.1.04.27.001	Pendapatan Denda Pajak Daerah	365.000.000,00
4.1.04.27.001.00081	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000,00
4.1.04.27.001.00122	Pendapatan Denda PBBP2	300.000.000,00
4.1.04.27.001.00127	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	5.000.000,00
4.1.04.27.001.00131	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	5.000.000,00
4.1.04.27.001.00156	Pendapatan Denda Opsen PKB	50.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	544.897.481.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	518.891.103.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	16.116.906.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	15.649.983.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	353.478.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	6.736.535.000,00
4.2.01.07.001.00004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	8.559.970.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	466.923.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.002.00001	DBH SDA Minyak Bumi	43.711.000,00
4.2.01.07.002.00003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	3.499.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	165.574.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	254.139.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	397.733.640.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	383.993.365.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	383.993.365.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	13.740.275.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.400.000.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	8.340.275.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	105.040.557.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	105.040.557.000,00
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	48.671.148.000,00
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	24.000.000,00
4.2.01.09.002.00009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	600.000.000,00
4.2.01.09.002.00022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	408.000.000,00
4.2.01.09.002.00026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	30.364.900.000,00
4.2.01.09.002.00027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	352.500.000,00
4.2.01.09.002.00028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	5.642.400.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler	3.446.700.000,00
4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.791.626.000,00
4.2.01.09.002.00034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	354.458.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8.693.710.000,00
4.2.01.09.002.00039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.118.615.000,00
4.2.01.09.002.00041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	400.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.006.378.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	26.006.378.000,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.006.378.000,00
4.2.02.01.001.00001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	500.000.000,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.838.890.000,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4.452.000,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.663.036.000,00
	Jumlah Pendapatan	838.206.685.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	828.406.011.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01	Belanja Pegawai	383.204.722.000,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	236.676.991.000,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	171.403.929.000,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	143.684.003.000,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	27.719.926.000,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.554.160.000,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12.973.007.000,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.581.153.000,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.701.544.000,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.701.544.000,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.882.256.000,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.539.959.000,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.342.297.000,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.022.077.000,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.700.364.000,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	321.713.000,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.385.319.000,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.590.250.000,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.795.069.000,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.155.604.000,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.155.604.000,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.898.000,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.988.000,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	910.000,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.783.111.000,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.006.146.000,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.776.965.000,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	464.416.000,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	364.289.000,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	100.127.000,00
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.308.677.000,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.060.244.000,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	248.433.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	118.930.120.000,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	21.587.371.000,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	21.193.251.000,00
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	394.120.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	10.773.452.000,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	10.549.647.000,00
5.1.01.02.003.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	223.805.000,00
5.1.01.02.004	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.223.437.000,00
5.1.01.02.004.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.140.471.000,00
5.1.01.02.004.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	82.966.000,00
5.1.01.02.005	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	32.276.177.000,00
5.1.01.02.005.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	31.706.452.000,00
5.1.01.02.005.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	569.725.000,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.069.683.000,00
5.1.01.02.006.00009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	136.830.000,00
5.1.01.02.006.00012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	92.453.000,00
5.1.01.02.006.00015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	600.945.000,00
5.1.01.02.006.00016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	721.135.000,00
5.1.01.02.006.00019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.204.084.000,00
5.1.01.02.006.00022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	17.020.000,00
5.1.01.02.006.00023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000,00
5.1.01.02.006.00025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	80.000.000,00
5.1.01.02.006.00026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	75.000.000,00
5.1.01.02.006.00027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	22.000.000,00
5.1.01.02.006.00030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	900.000,00
5.1.01.02.006.00035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	25.000.000,00
5.1.01.02.006.00037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	125.000.000,00
5.1.01.02.006.00041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	12.562.000,00
5.1.01.02.006.00043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	69.276.000,00
5.1.01.02.006.00047	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	200.000,00
5.1.01.02.006.00050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	36.500.000,00
5.1.01.02.006.00051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1.650.000,00
5.1.01.02.006.00055	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	10.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.006.00057	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	5.000.000,00
5.1.01.02.006.00063	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	128.980.000,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	38.203.228.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.000.000,00
5.1.01.02.006.00070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	10.467.920.000,00
5.1.01.02.006.00072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	20.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.515.575.000,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	801.591.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	801.591.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	88.235.000,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	88.235.000,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	115.354.000,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	115.354.000,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	71.112.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	71.112.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.162.307.000,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.162.307.000,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	113.459.000,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	113.459.000,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	54.002.000,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	54.002.000,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	367.500.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	367.500.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	9.549.000,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	9.549.000,00
5.1.01.04.011	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	22.000,00
5.1.01.04.011.00001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	22.000,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	11.304.254.000,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	206.640.000,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.649.000,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	2.061.000,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	11.093.904.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.954.890.000,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.954.890.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	63.300.000,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	63.300.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.104.500.000,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.603.000,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.603.000,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.342.000,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.342.000,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.685.000,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.685.000,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.348.000,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.348.000,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.960.000,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.960.000,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00
5.1.01.05.007	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.625.000,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.625.000,00
5.1.01.05.008	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	138.000,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	138.000,00
5.1.01.05.009	Belanja iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	173.000,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	173.000,00
5.1.01.05.010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	743.657.000,00
5.1.01.05.010.00009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	27.096.000,00
5.1.01.05.010.00012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	18.308.000,00
5.1.01.05.010.00015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	119.000.000,00
5.1.01.05.010.00016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	142.800.000,00
5.1.01.05.010.00019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	436.453.000,00
5.1.01.05.011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	180.967.000,00
5.1.01.05.011.00001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	5.000.000,00
5.1.01.05.011.00002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.000.000,00
5.1.01.05.011.00005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	12.000.000,00
5.1.01.05.011.00009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	425.000,00
5.1.01.05.011.00014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	59.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.011.00016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	39.000.000,00
5.1.01.05.011.00022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	19.992.000,00
5.1.01.05.011.00031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	6.000.000,00
5.1.01.05.011.00032	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	950.000,00
5.1.01.05.011.00036	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	5.000.000,00
5.1.01.05.011.00038	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	5.000.000,00
5.1.01.05.011.00044	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	26.800.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	881.136.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	248.136.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	248.136.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	633.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	633.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	1.096.400.000,00
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	1.096.400.000,00
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	1.096.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.121.916.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	41.691.800.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	41.644.970.000,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.188.318.000,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	311.611.000,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.609.344.000,00
5.1.02.01.001.00005	Belanja Bahan-Bahan Baku	19.162.000,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	72.340.000,00
5.1.02.01.001.00009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	21.840.000,00
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	3.975.000,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	406.600.000,00
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	14.100.000,00
5.1.02.01.001.00019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	3.633.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	387.986.000,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	528.157.000,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.408.893.500,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	37.480.000,00
5.1.02.01.001.00028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	432.414.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	51.101.000,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	760.999.000,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	724.039.000,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	190.394.000,00
5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	176.785.000,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	295.854.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	909.261.000,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.854.080.000,00
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.254.202.500,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	551.248.000,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.091.863.000,00
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	59.291.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.769.537.000,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.119.035.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	377.313.000,00
5.1.02.01.001.00079	Belanja Barang Sampel Pangan	14.114.000,00
5.1.02.01.002	Belanja Barang Tak Habis Pakai	46.830.000,00
5.1.02.01.002.00012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	46.830.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	198.714.558.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	142.718.917.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.202.453.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.263.750.000,00
5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	24.500.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	80.000.000,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	20.750.000,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	14.750.000,00
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	526.350.000,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	363.600.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	22.104.395.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	417.015.000,00
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	609.492.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.816.630.000,00
5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	237.800.000,00
5.1.02.02.001.00018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14.400.000,00
5.1.02.02.001.00019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	29.800.000,00
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	261.275.000,00
5.1.02.02.001.00022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	52.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	871.500.000,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.177.600.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.339.163.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	207.050.000,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	749.710.000,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	476.900.000,00
5.1.02.02.001.00032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	94.240.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.019.800.000,00
5.1.02.02.001.00038	Belanja Jasa Tata Rias	4.500.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	379.800.000,00
5.1.02.02.001.00041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	7.500.000,00
5.1.02.02.001.00043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	2.000.000,00
5.1.02.02.001.00046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.500.000,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.964.300.000,00
5.1.02.02.001.00048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	669.200.000,00
5.1.02.02.001.00049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	35.034.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	202.334.000,00
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.958.454.000,00
5.1.02.02.001.00052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	109.080.000,00
5.1.02.02.001.00053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	72.000.000,00
5.1.02.02.001.00054	Belanja Jasa Jalan/Tol	10.000.000,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.075.300.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	487.930.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	1.432.454.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	24.849.221.000,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	17.400.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.268.217.000,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	299.860.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	606.602.000,00
5.1.02.02.001.00069	Belanja Pengolahan Air Limbah	21.100.000,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	60.712.000,00
5.1.02.02.001.00077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	136.812.000,00
5.1.02.02.001.00079	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	157.210.000,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	56.000.000,00
5.1.02.02.001.00082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	2.350.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	1.584.000.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	458.800.000,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	6.856.189.000,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	25.131.895.000,00
5.1.02.02.001.00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	3.120.627.000,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	10.696.613.000,00
5.1.02.02.002	Belanja luran Jaminan/Asuransi	38.462.745.000,00
5.1.02.02.002.00003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	32.143.305.000,00
5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	571.200.000,00
5.1.02.02.002.00005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	724.573.000,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	185.620.000,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	173.495.000,00
5.1.02.02.002.00008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	109.000.000,00
5.1.02.02.002.00009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	303.000.000,00
5.1.02.02.002.00010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	318.778.000,00
5.1.02.02.002.00012	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	459.010.000,00
5.1.02.02.002.00013	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	457.482.000,00
5.1.02.02.002.00014	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	119.328.000,00
5.1.02.02.002.00015	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan	275.268.000,00
5.1.02.02.002.00016	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan	24.384.000,00
5.1.02.02.002.00018	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	353.916.000,00
5.1.02.02.002.00019	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	1.218.300.000,00
5.1.02.02.002.00020	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	139.584.000,00
5.1.02.02.002.00021	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	503.852.000,00
5.1.02.02.002.00022	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	7.392.000,00
5.1.02.02.002.00023	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan	17.052.000,00
5.1.02.02.002.00024	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan	1.512.000,00
5.1.02.02.002.00026	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	25.188.000,00
5.1.02.02.002.00027	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	79.746.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.002.00028	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	8.214.000,00
5.1.02.02.002.00029	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	33.612.000,00
5.1.02.02.002.00030	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	9.504.000,00
5.1.02.02.002.00031	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan	21.924.000,00
5.1.02.02.002.00032	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan	1.944.000,00
5.1.02.02.002.00034	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	30.456.000,00
5.1.02.02.002.00035	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	96.432.000,00
5.1.02.02.002.00036	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	10.620.000,00
5.1.02.02.002.00037	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	39.054.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.596.676.000,00
5.1.02.02.004.00022	Belanja Sewa Electric Generating Set	20.700.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.301.978.000,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	358.250.000,00
5.1.02.02.004.00118	Belanja Sewa Mebel	105.071.000,00
5.1.02.02.004.00121	Belanja Sewa Alat Pendingin	1.778.000,00
5.1.02.02.004.00123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	679.324.000,00
5.1.02.02.004.00410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	129.575.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.290.525.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	26.000.000,00
5.1.02.02.005.00027	Belanja Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.000.000.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	264.525.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.636.275.000,00
5.1.02.02.008.00002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	72.000.000,00
5.1.02.02.008.00005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	124.365.000,00
5.1.02.02.008.00006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	159.172.750,00
5.1.02.02.008.00008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	157.790.000,00
5.1.02.02.008.00009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	529.109.000,00
5.1.02.02.008.00012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	30.071.250,00
5.1.02.02.008.00015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	300.000.000,00
5.1.02.02.008.00018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	51.500.000,00
5.1.02.02.008.00020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	212.267.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.117.859.000,00
5.1.02.02.009.00002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	64.800.000,00
5.1.02.02.009.00003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	105.000.000,00
5.1.02.02.009.00006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	40.000.000,00
5.1.02.02.009.00011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	226.059.000,00
5.1.02.02.009.00012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	25.000.000,00
5.1.02.02.009.00013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	325.000.000,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	332.000.000,00
5.1.02.02.010	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	20.500.000,00
5.1.02.02.010.00006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	20.500.000,00
5.1.02.02.011	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	50.000.000,00
5.1.02.02.011.00001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	50.000.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.314.455.000,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.294.125.000,00
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	2.781.880.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	44.190.000,00
5.1.02.02.012.00004	Belanja Diklat Kepemimpinan	194.260.000,00
5.1.02.02.013	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	578.396.000,00
5.1.02.02.013.00009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	21.074.000,00
5.1.02.02.013.00012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	14.239.000,00
5.1.02.02.013.00015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	92.555.000,00
5.1.02.02.013.00016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	111.065.000,00
5.1.02.02.013.00019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	339.463.000,00
5.1.02.02.014	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	553.155.000,00
5.1.02.02.014.00001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.440.000,00
5.1.02.02.014.00002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	137.475.000,00
5.1.02.02.014.00004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	16.394.000,00
5.1.02.02.014.00005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	135.700.000,00
5.1.02.02.014.00006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	5.162.000,00
5.1.02.02.014.00009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	500.000,00
5.1.02.02.014.00014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.014.00016	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan	115.000.000,00
5.1.02.02.014.00019	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	2.100.000,00
5.1.02.02.014.00020	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	5.000.000,00
5.1.02.02.014.00022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.720.000,00
5.1.02.02.014.00027	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	44.000,00
5.1.02.02.014.00031	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	22.500.000,00
5.1.02.02.014.00036	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.02.014.00038	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	5.000.000,00
5.1.02.02.014.00044	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	23.120.000,00
5.1.02.02.015	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	19.000.000,00
5.1.02.02.015.00002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	19.000.000,00
5.1.02.02.019	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.356.055.000,00
5.1.02.02.019.00001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.356.055.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.440.396.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.848.394.000,00
5.1.02.03.002.00003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	540.000.000,00
5.1.02.03.002.00006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	7.000.000,00
5.1.02.03.002.00007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	49.000.000,00
5.1.02.03.002.00008	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	4.000.000,00
5.1.02.03.002.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	50.000.000,00
5.1.02.03.002.00023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	16.443.000,00
5.1.02.03.002.00034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	37.500.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	525.500.000,00
5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	131.500.000,00
5.1.02.03.002.00039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	103.000.000,00
5.1.02.03.002.00040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.225.651.000,00
5.1.02.03.002.00044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	20.000.000,00
5.1.02.03.002.00064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	7.175.000,00
5.1.02.03.002.00095	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya	2.547.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.002.00103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.640.000,00
5.1.02.03.002.00108	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	85.000.000,00
5.1.02.03.002.00115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	24.000.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.450.000,00
5.1.02.03.002.00118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	28.450.000,00
5.1.02.03.002.00120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	16.500.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	346.353.000,00
5.1.02.03.002.00122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	165.000,00
5.1.02.03.002.00132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	23.300.000,00
5.1.02.03.002.00134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	4.600.000,00
5.1.02.03.002.00138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	5.870.000,00
5.1.02.03.002.00140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	10.620.000,00
5.1.02.03.002.00238	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	17.844.000,00
5.1.02.03.002.00243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	19.000.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	222.560.000,00
5.1.02.03.002.00410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	198.700.000,00
5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	120.026.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.758.232.000,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.644.227.000,00
5.1.02.03.003.00036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	114.005.000,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	833.770.000,00
5.1.02.03.004.00004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	200.000.000,00
5.1.02.03.004.00031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	330.800.000,00
5.1.02.03.004.00054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	70.000.000,00
5.1.02.03.004.00069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	232.970.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.459.125.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.809.125.000,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.519.371.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.922.604.000,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66.250.000,00
5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	300.900.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04.002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	650.000.000,00
5.1.02.04.002.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	650.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.424.950.000,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.424.950.000,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	678.000.000,00
5.1.02.05.001.00002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	38.550.000,00
5.1.02.05.001.00004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	12.550.000,00
5.1.02.05.001.00005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	3.695.850.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	22.530.900.000,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	21.914.500.000,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	21.562.000.000,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	352.500.000,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	258.900.000,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	176.400.000,00
5.1.02.89.002.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
5.1.02.89.003	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	357.500.000,00
5.1.02.89.003.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	357.500.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	121.860.187.000,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	121.860.187.000,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	121.860.187.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	22.589.973.000,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	596.700.000,00
5.1.05.01.002	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	596.700.000,00
5.1.05.01.002.00001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	596.700.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.545.173.000,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.910.173.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.668.173.000,00
5.1.05.05.001.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	242.000.000,00
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	40.000.000,00
5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	40.000.000,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	595.000.000,00
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	390.000.000,00
5.1.05.05.003.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	205.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	17.448.100.000,00
5.1.05.08.001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	8.802.900.000,00
5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	8.802.900.000,00
5.1.05.08.002	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.466.000.000,00
5.1.05.08.002.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.466.000.000,00
5.1.05.08.003	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.179.200.000,00
5.1.05.08.003.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.179.200.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	489.400.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	159.000.000,00
5.1.06.01.002	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	159.000.000,00
5.1.06.01.002.00001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	159.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	40.000.000,00
5.1.06.02.002	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	40.000.000,00
5.1.06.02.002.00001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	40.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	190.500.000,00
5.1.06.03.002	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	190.500.000,00
5.1.06.03.002.00001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	190.500.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	99.900.000,00
5.1.06.04.002	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	99.900.000,00
5.1.06.04.002.00001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	99.900.000,00
5.2	BELANJA MODAL	18.750.674.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.762.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.762.000,00
5.2.01.01.001	Belanja Modal Tanah Persil	1.762.000,00
5.2.01.01.001.00007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.762.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.505.336.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	83.600.000,00
5.2.02.01.001	Belanja Modal Alat Besar Darat	46.065.000,00
5.2.02.01.001.00007	Belanja Modal Compacting Equipment	46.065.000,00
5.2.02.01.003	Belanja Modal Alat Bantu	37.535.000,00
5.2.02.01.003.00005	Belanja Modal Pompa	37.535.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.489.000,00
5.2.02.03.001	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	15.489.000,00
5.2.02.03.001.00006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	15.489.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	550.440.000,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	217.030.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.001.00004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.644.000,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	204.386.000,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	333.410.000,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	240.364.000,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	13.828.000,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	61.997.000,00
5.2.02.05.002.00007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	17.221.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	420.650.000,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	404.950.000,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	300.000.000,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	104.950.000,00
5.2.02.06.002	Belanja Modal Alat Komunikasi	15.700.000,00
5.2.02.06.002.00001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	15.700.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	158.014.000,00
5.2.02.08.003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	158.014.000,00
5.2.02.08.003.00014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	158.014.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	907.655.000,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	845.678.000,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	526.530.000,00
5.2.02.10.001.00003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	319.148.000,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	61.977.000,00
5.2.02.10.002.00004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	61.977.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.369.488.000,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.369.488.000,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.369.488.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.525.424.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	5.225.424.000,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.225.424.000,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.468.706.000,00
5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.756.718.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	300.000.000,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	300.000.000,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	300.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.718.152.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.533.159.000,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	8.533.159.000,00
5.2.04.01.001.00004	Belanja Modal Jalan Kota	368.320.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.01.001.00005	Belanja Modal Jalan Desa	8.164.839.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	184.993.000,00
5.2.04.03.001	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	45.000.000,00
5.2.04.03.001.00005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	45.000.000,00
5.2.04.03.006	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	139.993.000,00
5.2.04.03.006.00003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik	139.993.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	853.156.685.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-14.950.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	19.335.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.335.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	19.335.000.000,00
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	13.500.000.000,00
6.1.01.05.001.00001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	5.000.000.000,00
6.1.01.05.001.00002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	1.000.000.000,00
6.1.01.05.001.00007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	3.000.000.000,00
6.1.01.05.001.00008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	4.500.000.000,00
6.1.01.05.002	Penghematan Belanja-Belanja Modal	4.835.000.000,00
6.1.01.05.002.00002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	1.000.000.000,00
6.1.01.05.002.00021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	2.100.000.000,00
6.1.01.05.002.00025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	1.735.000.000,00
6.1.01.05.003	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
6.1.01.05.003.00001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.385.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	4.385.000.000,00
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	4.385.000.000,00
6.2.01.01.001	Pembentukan Dana Cadangan	4.385.000.000,00
6.2.01.01.001.00001	Pembentukan Dana Cadangan	4.385.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.385.000.000,00
	Pembiayaan Netto	14.950.000.000,00

6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00
-----	---	------

Kota Pekalongan, 31 Desember 2025

Wali Kota

Ttd

Stempel

H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE, MM



Sekretaris Daerah

Nur Priyantomp, S.E., M.M